



Analisis Jaringan Media Sosial terhadap Gerakan Opini Publik pada Tagar #TolakRevisiUUTNI di Platform X

Fadil Muharrom*, Eka Yuda Gunawibawa

Universitas Lampung

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.3915>

*Correspondence: Fadil Muharrom

Email: fadilmuharrom00@gmail.com

Received: 03-10-2026

Accepted: 14-11-2026

Published: 28-12-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Pengesahan Revisi Undang-Undang TNI pada 20 Maret 2025 memicu respons penolakan masyarakat yang berkembang luas di media sosial melalui penggunaan tagar #TolakRevisiUUTNI di platform X. Fenomena ini menunjukkan terbentuknya gerakan opini publik digital sebagai bentuk respons masyarakat terhadap kebijakan publik yang dianggap dapat mengancam demokrasi dan dominasi militer di institusi sipil serta minimnya keterbukaan informasi dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana gerakan opini publik digital #TolakRevisiUUTNI sebagai respons masyarakat terhadap kebijakan revisi Undang-Undang TNI dimediasi melalui jejaring media sosial pada tagar #TolakRevisiUUTNI di platform X. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode *Social Media Network Analysis* (SMNA). Kerangka teoretis yang digunakan adalah *Digital Movement of Opinion* (DMO) serta teori Ruang Publik. Data diperoleh melalui teknik *crawling* terhadap *tweet* yang memuat tagar #TolakRevisiUUTNI pada periode 20–27 Maret 2025 menggunakan Google Colab. Dari total 4.098 *tweet* yang terkumpul, sebanyak 3.895 *tweet* dinyatakan relevan dan dianalisis menggunakan perangkat lunak Gephi 0.10.1. Analisis jaringan dilakukan pada level sistem, kelompok, dan aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan percakapan

#TolakRevisiUUTNI memiliki struktur yang renggang, terdesentralisasi, serta didominasi oleh pola komunikasi satu arah. Jaringan tersebut terfragmentasi ke dalam banyak kelompok percakapan dan melibatkan aktor dari berbagai latar belakang tanpa adanya aktor dominan yang mengendalikan arus komunikasi. Pola ini menunjukkan bahwa gerakan opini publik digital #TolakRevisiUUTNI berkembang secara organik sebagai respons kolektif masyarakat terhadap kebijakan revisi Undang-Undang TNI melalui ruang publik digital di media sosial.

Kata kunci: Opini Publik, Analisis Jaringan Media Sosial, #TolakRevisiUUTNI, *Digital Movement of Opinion*, Ruang Publik.

Abstract: The ratification of the revised TNI Law on March 20, 2025, triggered widespread public opposition on social media through the use of the hashtag #TolakRevisiUUTNI on the X platform. This phenomenon shows the formation of a digital public opinion movement as a form of public response to public policies that are considered to threaten democracy and military domination in civilian institutions, as well as the lack of information transparency from the government. This study aims to describe how the #TolakRevisiUUTNI digital public opinion movement, as a public response to the TNI Law revision policy, is mediated through social media networks on the hashtag #TolakRevisiUUTNI on the X platform. This study uses a descriptive quantitative approach with the *Social Media Network Analysis* (SMNA) method. The theoretical framework used is the *Digital Movement of Opinion* (DMO) and *Public Sphere* theory. Data was obtained through *crawling* techniques on tweets containing the hashtag #TolakRevisiUUTNI during the period of March 20-27, 2025, using Google Colab. Of the total 4,098 tweets collected, 3,895 tweets were deemed relevant and analyzed using Gephi 0.10.1 software. Network analysis was conducted at the system, group, and actor levels. The results showed that the #TolakRevisiUUTNI conversation network had a loose, decentralized structure and was dominated by one-way communication patterns. The network is fragmented into many conversation groups and involves actors from various backgrounds without any dominant actors controlling the flow of communication. This pattern shows that the #TolakRevisiUUTNI digital public opinion movement developed organically as a collective response from the public to the policy of revising the TNI Law through digital public spaces on social media.

Keywords: Public Opinion, Social Media Network Analysis, #TolakRevisiUUTNI, *Digital Movement of Opinion*, Public Sphere.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, telah membawa transformasi signifikan dalam cara masyarakat berkomunikasi, membentuk opini, dan berpartisipasi dalam isu-isu publik (Nur dkk., 2024). Media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, melainkan juga sebagai arena pembentukan opini publik dan mobilisasi sikap politik secara kolektif (Hidayat dkk., 2025). Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat penetrasi media sosial tertinggi di dunia, menunjukkan dinamika tersebut secara menonjol. Pada Januari 2025, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 143 juta jiwa atau 50,2% dari total populasi, dengan platform X menempati posisi penting sebagai ruang diskursus publik digital (Kemp, 2025).

Melalui fitur unggahan, komentar, dan penggunaan tagar, media sosial memungkinkan opini individual berkembang menjadi opini publik digital ketika memperoleh resonansi dan dukungan luas (Suhendra & Selly Pratiwi, 2024). Opini publik, sebagaimana dijelaskan Santoso Sastropoetro (dalam Kusnanto & Yusuf, 2024) merupakan pendapat kolektif masyarakat mengenai suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam konteks digital, opini tersebut bersifat dinamis, cepat menyebar, dan sering kali melampaui batas-batas kelompok sosial konvensional. Kondisi ini mendorong lahirnya berbagai bentuk aktivisme digital, yakni praktik penggunaan teknologi komunikasi untuk memobilisasi perhatian dan sikap publik secara cepat dan efektif (Dwityas dkk., 2023).

Salah satu elemen kunci dalam aktivisme digital adalah penggunaan tagar atau *hashtag* (Wuriani, 2021). Tagar tidak hanya berfungsi sebagai penanda topik, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengonsolidasikan opini publik digital terhadap berbagai persoalan yang ada di masyarakat (Putri Ajie & Wardhana, 2025). Fenomena ini selaras dengan konsep *Digital Movement of Opinion* (DMO) yang merujuk pada gerakan opini publik berbasis media digital yang bersifat spontan, tidak berlangsung lama, menunjukkan keseragaman opini, dan lintas sektor (Barisione & Ceron dalam Eriyanto, 2019). Sejumlah studi menunjukkan bahwa tagar dengan narasi tegas dan muatan emosional tinggi cenderung efektif dalam memobilisasi solidaritas publik dan memperluas jangkauan wacana di ruang digital (Eriyanto, 2021).

Dalam perspektif teoretis, dinamika tersebut berkaitan erat dengan konsep Ruang Publik. Jürgen Habermas memaknai ruang publik bukan sebagai ruang fisik semata, melainkan sebagai proses komunikasi di mana warga negara membentuk opini melalui diskursus rasional mengenai kepentingan bersama (Hardiman, 2014). Namun, ruang publik tidak pernah sepenuhnya bebas dari distorsi, terutama ketika terdapat ketimpangan akses informasi dan dominasi kepentingan tertentu (Rakinda dkk., 2026). Dalam masyarakat kontemporer, media sosial kerap berfungsi sebagai ruang publik alternatif (Alim & Dharma, 2021), terutama ketika ruang deliberasi formal gagal menyediakan komunikasi yang transparan, inklusif, dan partisipatif.

Kondisi tersebut tercermin dalam dinamika respons masyarakat terhadap Revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR RI pada 20 Maret 2025. Pengesahan ini memicu gelombang penolakan di ruang luring dan daring dengan tagar seperti #TolakRUUTNI dan #TolakRevisiUUTNI menjadi medium utama ekspresi dan mobilisasi opini publik di

platform X (Athallah dkk., 2025). Pada 21 Maret 2025, tagar tersebut menempati posisi *trending topic* nomor satu dan digunakan lebih dari satu juta kali dalam waktu singkat (Chaterine & Ramadhan, 2025). Penolakan publik terutama diarahkan pada sejumlah pasal yang dinilai berpotensi mengancam demokrasi di Indonesia, khususnya Pasal 47 dan Pasal 53 (Wahyuningtyas, 2025).

Namun, menguatnya aktivisme digital ini tidak semata-mata dipicu oleh substansi kebijakan, melainkan juga oleh persoalan komunikasi pemerintah dalam proses legislasi (Utami, P., 2025). Minimnya keterbukaan informasi serta absennya partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam pembahasan RUU TNI mendorong publik mencari ruang alternatif untuk menyalurkan aspirasi dan kritik (Atma & Wibowo, 2026). Padahal, prinsip partisipasi publik telah ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, didengar, dan memperoleh tanggapan dalam proses pembentukan kebijakan (Sjarif, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, dinamika opini publik digital pada tagar #TolakRevisiUUTNI menjadi penting untuk dikaji bukan hanya sebagai ekspresi penolakan terhadap substansi kebijakan, tetapi juga sebagai respons atas kegagalan komunikasi publik dalam menyediakan informasi yang transparan dan ruang partisipasi yang inklusif. Media sosial dalam konteks ini berfungsi sebagai ruang publik digital alternatif, tempat berlangsungnya proses pembentukan, distribusi, dan konsolidasi opini publik terhadap kebijakan negara. Meskipun sejumlah penelitian telah membahas peran media sosial dalam aktivisme digital, kajian yang secara khusus mengintegrasikan pemetaan struktur jaringan komunikasi digital dengan refleksi teoritis mengenai dinamika gerakan opini publik digital dalam perspektif ruang publik masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks isu kebijakan publik nasional yang strategis.

Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *Social Media Network Analysis* (SMNA) terhadap percakapan pada tagar #TolakRevisiUUTNI di platform X berdasarkan data yang dikumpulkan melalui teknik crawling pada periode 20–27 Maret 2025. Melalui pemetaan struktur jaringan, pembentukan kelompok, dan posisi aktor, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran empiris mengenai dinamika gerakan opini publik digital sekaligus merefleksikannya dalam kerangka konseptual *Digital Movement of Opinion* serta teori ruang publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi politik digital dan studi opini publik dalam konteks ekosistem media baru di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan pendekatan deskriptif serta menggunakan metode *Social Media Network Analysis* (SMNA) untuk memetakan gerakan opini publik digital #TolakRevisiUUTNI sebagai bentuk respons masyarakat terhadap kebijakan revisi Undang-Undang TNI pada platform X dengan fokus pada struktur jaringan komunikasi, pola pengelompokan, serta posisi dan peran aktor dalam jaringan yang terbentuk. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya bersifat numerik dan dianalisis

menggunakan teknik statistik guna memperoleh pemahaman yang terukur terhadap fenomena yang dikaji (Sugiyono, 2023). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik jaringan secara sistematis tanpa menguji hubungan kausal antarkomponen (Sudaryana & Agusiady, 2022). Unit analisis penelitian ini adalah jaringan media sosial yang terbentuk dari interaksi antaraktor (akun pada platform X). Dalam analisis jaringan, jaringan dipahami sebagai struktur yang terdiri atas aktor (*nodes*) dan relasi (*edges*) yang menghubungkan aktor-aktor tersebut melalui interaksi komunikasi yang dapat diamati secara empiris (Eriyanto, 2021). Relasi yang dianalisis meliputi aktivitas *mention*, *reply*, dan *retweet*.

Data dikumpulkan melalui teknik data *crawling* terhadap platform X pada periode 20–27 Maret 2025, yaitu fase ketika isu Revisi Undang-Undang TNI memicu intensitas percakapan publik yang tinggi. *Crawling* merupakan teknik yang memungkinkan peneliti memperoleh data secara otomatis dari algoritma berbagai sumber daring berdasarkan kata kunci tertentu atau parameter yang telah ditentukan sebelumnya (Putra dkk., 2020; Rismawan & Syahidin, 2023). Penelitian ini menggunakan skrip *crawling* yang dibagikan oleh Satria (2024) dengan adaptasi tahapan teknis dari Tripalupi (2024). Proses *crawling* meliputi pembuatan token autentikasi, penyesuaian parameter pencarian (tagar, rentang waktu, dan jumlah *tweet*), serta penyimpanan data dalam format CSV. Data dikumpulkan berdasarkan tagar #TolakRevisiUUTNI pada periode 20–27 Maret 2025, saat isu revisi UU TNI menjadi perhatian publik dan memicu berbagai respons di media sosial. Proses ini menghasilkan 4.098 *tweet*. Sebelum dianalisis, data melalui tahap pembersihan dan validasi untuk memastikan kualitas dataset (Santoso & Priyadi, 2024). Tahapan tersebut meliputi:

1. Pembersihan data
 - a. Identifikasi *missing data*, yaitu kondisi ketika sebagian informasi tidak tersedia dalam dataset, di mana dalam sejumlah kasus dapat mengakibatkan pendugaan parameter menjadi kurang efisien (Jabir dkk., 2023).
 - b. Pemeriksaan konsistensi format data, khususnya pada atribut waktu dan jumlah interaksi. Hal ini guna mencegah Inkonsistensi dalam data yang dapat terjadi akibat perbedaan format dari berbagai sumber atau kesalahan manusia saat proses entri data (Alhady, 2023).
 - c. Pengecekan duplikasi data berdasarkan *URL tweet* sebagai identitas unik.
2. Validasi data
 - a. Pemeriksaan *outliers* dan *Noise*,

Validasi data bahwa telah bebas dari *outliers* yaitu data atau entitas yang memiliki karakteristik sangat berbeda dibandingkan dengan sebagian besar data lainnya dalam satu set data (Mutaqqin, 2022). Kemudian Mengeliminasi *tweet noise* berupa spam, promosi, atau konten hiburan yang tidak berkaitan dengan isu.

b. Validasi terhadap sumber eksternal

Di mana data penelitian ini berupa informasi digital yang dapat diverifikasi melalui penelusuran sumber dan rekam jejak digital yang tersedia secara publik. Pengumpulan data dilakukan menggunakan Google Colab dengan skrip crawling berbasis *auth_token* dari platform X, yang memungkinkan penghimpunan percakapan publik langsung dari tampilan web tanpa melalui API resmi. Metode ini telah digunakan dalam penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Ghufron, dkk. (2024) dalam analisis jejaring sosial terkait fenomena *cyberbullying* di fandom K-Pop, serta oleh Tripalupi, dkk. (2024) dalam kajian resistensi sosial pengguna media sosial melalui analisis jaringan komunikasi, sehingga prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid dan dapat direplikasi.

c. Verifikasi kesesuaian data dengan batasan waktu penelitian.

Verifikasi batasan data dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dengan kriteria teknis, seperti tipe data dan rentang waktu. Dalam penelitian ini, data yang dianalisis merupakan data relasional berbasis peristiwa (*event-based*), di mana aktor diidentifikasi berdasarkan keterlibatannya dalam isu revisi UU TNI (Eriyanto, 2021). Oleh karena itu, pengambilan data difokuskan pada periode 20–27 Maret 2025, yaitu saat percakapan publik dengan tagar #TolakRevisiUUTNI mencapai intensitas tertinggi.

Berdasarkan proses tersebut, sebanyak 3.895 *tweet* dinyatakan relevan dan digunakan dalam analisis jaringan. Data yang telah tervalidasi kemudian ditransformasikan ke dalam format *edge list* untuk merepresentasikan relasi komunikasi antar akun (Eriyanto, 2021). Dalam format ini, setiap baris merepresentasikan satu relasi dengan akun pengirim interaksi sebagai *source* dan akun penerima sebagai *target* yang dibentuk dari aktivitas *mention*, *reply*, dan *retweet*. Analisis jaringan dilakukan menggunakan perangkat lunak Gephi versi 0.10.1. Jaringan yang terbentuk terdiri atas 2.016 aktor (*nodes*) dan 2.352 relasi (*edges*). Analisis dilakukan pada tiga level jaringan sebagai berikut:

1. Level sistem

- a. Densitas: menunjukkan tingkat kerapatan hubungan antar aktor dalam jaringan, yaitu perbandingan antara jumlah relasi yang terbentuk dengan jumlah relasi yang secara teoritis mungkin terjadi (Radjah dkk., 2023). Nilai densitas berada dalam rentang 0–1, di mana nilai yang mendekati 0 menunjukkan jaringan yang longgar dan nilai yang mendekati 1 menunjukkan jaringan yang semakin rapat.
- b. Diameter: menunjukkan jarak terjauh antara dua aktor dalam jaringan yang merepresentasikan jumlah langkah maksimum yang diperlukan seorang aktor untuk menjangkau aktor lain dalam struktur jaringan (Anbarini dkk., 2023). Nilai diameter bersifat kontekstual dan tidak memiliki ambang normatif baku.

- c. Sentralisasi: menunjukkan tingkat pemusatan struktur jaringan pada satu atau beberapa aktor dominan. Nilai sentralisasi berada dalam rentang 0–1, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan jaringan yang sangat terpusat, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan struktur jaringan yang lebih merata (Akbar dkk., 2022).
 - d. Resiprositas: menunjukkan kecenderungan hubungan komunikasi dua arah antaraku dalam jaringan (Utami, S. R., dkk., 2021). Nilai resiprositas berada dalam rentang 0–1, di mana nilai 0 menunjukkan tidak adanya hubungan timbal balik dan nilai 1 menunjukkan seluruh relasi bersifat dua arah.
2. Level kelompok
 - a. Modularitas: menunjukkan sejauh mana jaringan terbagi ke dalam kluster atau komunitas percakapan berdasarkan intensitas hubungan internal. Nilai modularitas berada dalam rentang 0–1, di mana nilai yang mendekati 0 menunjukkan jaringan cenderung terintegrasi dalam satu kelompok besar, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan jaringan semakin terfragmentasi ke dalam banyak kluster (Alfarizy & Arianto, 2024).
 3. Level aktor
 - a. *Degree centrality* (sentralitas tingkatan): menunjukkan tingkat keterhubungan langsung seorang aktor dengan aktor lain dalam jaringan (Setiamukti & Nasvian, 2023). Nilai *degree centrality* telah dinormalisasi dalam rentang 0–1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan aktor yang lebih populer atau lebih sering terlibat dalam relasi komunikasi.
 - b. *Closeness centrality* (sentralitas kedekatan): menunjukkan kedekatan seorang aktor dengan aktor lain dalam jaringan yang dihitung berdasarkan jarak rata-rata terpendek (Ariyanti, 2022). Nilai *closeness centrality* berada dalam rentang 0–1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan aktor lebih cepat menjangkau atau dijangkau oleh aktor lain.
 - c. *Betweenness centrality* (sentralitas perantara): menunjukkan peran seorang aktor sebagai penghubung atau perantara dalam jalur komunikasi jaringan (Srinanda dkk., 2020). Nilai *betweenness centrality* telah dinormalisasi dalam rentang 0–1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan peran aktor yang semakin penting sebagai mediator dalam jaringan.

Sebagai pendukung nilai metrik analisis jaringan, penelitian ini menyajikan visualisasi jaringan menggunakan Gephi untuk memudahkan pembacaan pola struktur dan posisi aktor (Eriyanto, 2021). Selain itu, *word cloud* disajikan untuk menggambarkan kecenderungan narasi dominan dalam percakapan digital terkait tagar #TolakRevisiUUTNI, yang dihasilkan melalui tahapan praproses teks menggunakan Orange Data Mining versi 3.38.1 yang meliputi pembersihan simbol, tokenisasi, normalisasi, dan penyaringan kata tidak bermakna (Pahtoni & Jati, 2024).

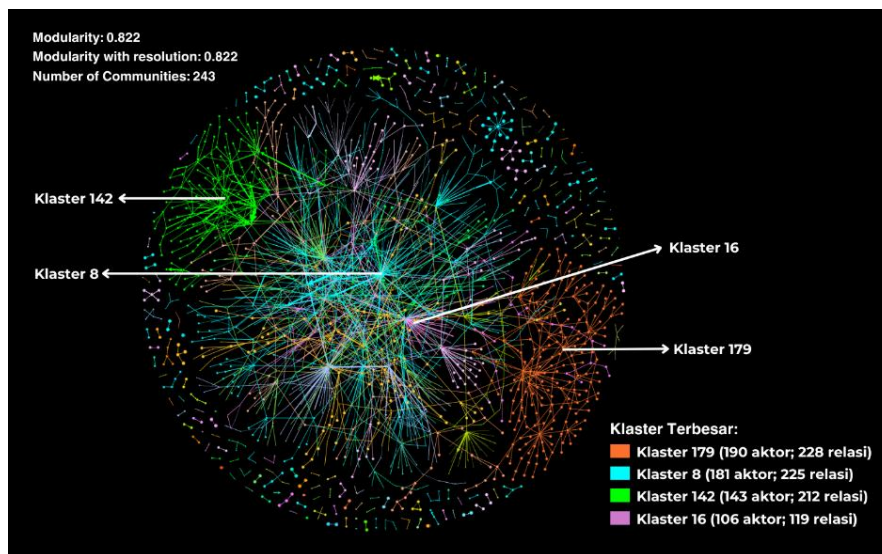
Hasil dan Pembahasan

Analisis jaringan media sosial terhadap percakapan publik dengan tagar #TolakRevisiUUTNI di platform X dilakukan berdasarkan 3.895 *tweet* relevan yang dikumpulkan pada periode 20–27 Maret 2025. Data tersebut membentuk jaringan yang terdiri atas 2.016 aktor (*nodes*) dan 2.352 relasi (*edges*) yang merepresentasikan interaksi *mention*, *reply*, dan *retweet* antaraktor. Pada level sistem, hasil analisis jaringan menunjukkan nilai densitas sebesar 0,001, diameter 14, sentralisasi 0,0000157, dan resiprositas 0,0534 (lihat Tabel 2). Nilai-nilai ini menggambarkan struktur jaringan dengan kerapatan hubungan antaraktor yang longgar, tidak terpusat, dan didominasi oleh komunikasi satu arah.

Tabel 1. Hasil Analisis Jaringan Level Sistem

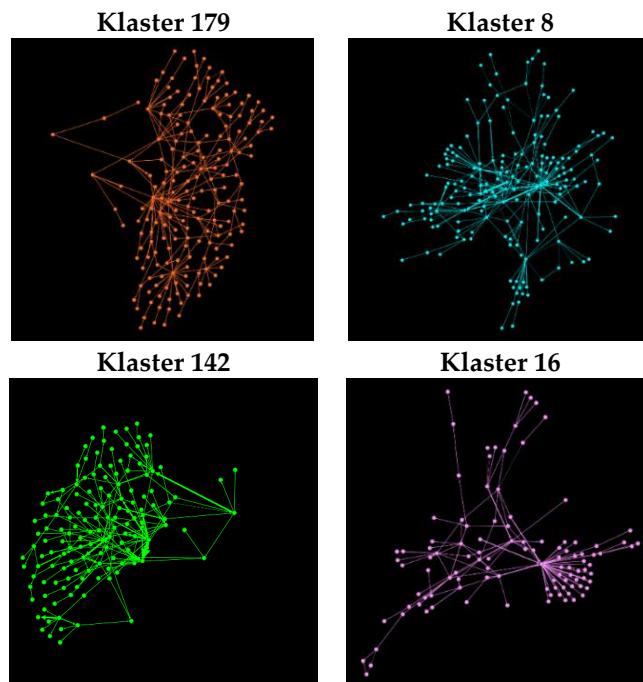
Unit Analisis	Hasil Olah Data
Densitas	0.001
Diameter	14
Sentralisasi	0.0000157
Resiprositas	0.0534146

Sedangkan, pada level kelompok, nilai modularitas jaringan tercatat sebesar 0,822 yang menunjukkan bahwa percakapan publik terfragmentasi ke dalam banyak kluster dengan keterhubungan antarkelompok yang relatif lemah. Dari visualisasi gambar 1 di bawah, terlihat bahwa jaringan #TolakRevisiUUTNI terdiri atas banyak kelompok yang tumpang tindih dengan warna yang berbeda dan tersebar di seluruh struktur jaringan.



Gambar 1. Modularitas Jaringan #TolakRevisiUUTNI di X

Untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik, Gambar 2 di bawah menampilkan empat kluster terbesar dalam jaringan #TolakRevisiUUTNI, yaitu kluster 179 (190 aktor; 228 relasi), kluster 8 (181 aktor; 225 relasi), kluster 142 (143 aktor; 212 relasi), dan kluster 16 (106 aktor; 119 relasi). Keempat kluster tersebut menunjukkan intensitas interaksi internal yang relatif lebih tinggi dibandingkan kluster lain.



Gambar 2. Empat Klaster Terbesar Jaringan #TolakRevisiUUTNI

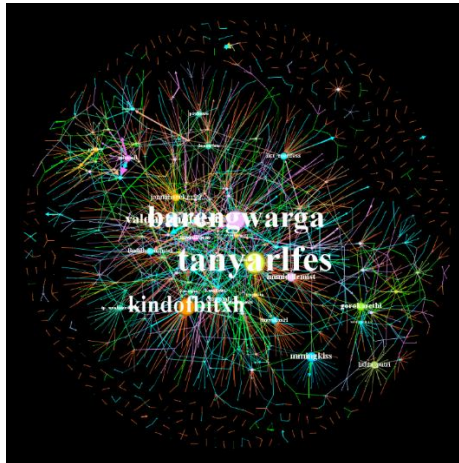
Pada level aktor, analisis sentralitas dilakukan untuk mengidentifikasi posisi dan peran aktor dalam jaringan percakapan #TolakRevisiUUTNI. Analisis mencakup *degree centrality*, *closeness centrality*, dan *betweenness centrality* yang seluruhnya dihitung dalam bentuk nilai ternormalisasi (0 hingga 1).

Tabel 2. Hasil Analisis *Degree Centrality*

Akun	Degree	In Degree	Out Degree	Degree Centrality (Normalized)
tanyarlfes	66	66	0	0.032754342
barengwarga	61	61	0	0.030272953
kindofbitxh	52	52	0	0.025806452
valdacimolnrvt	39	37	2	0.019354839
mmingkiss	30	3	27	0.014888337
immiddlemist	28	28	0	0.013895782
gorokareshi	27	0	27	0.013399504
jannahseeker99	26	0	26	0.012903226
lithia_putri	24	0	24	0.011910670
convomf	23	23	0	0.011414392

Berdasarkan tabel hasil analisis *degree centrality* di atas menunjukkan bahwa akun @tanyarlfes menempati posisi tertinggi dengan nilai 0,0327 dan jumlah *in-degree* terbesar, yaitu 66 relasi masuk, diikuti oleh akun @barengwarga (0,0303) dan @kindofbitxh (0,0258). Temuan ini menunjukkan bahwa akun-akun tersebut memiliki tingkat keterhubungan langsung paling tinggi dalam jaringan percakapan, baik sebagai penerima maupun pengirim interaksi. Selain itu, akun @gorokareshi merupakan aktor dengan *out-degree* tertinggi, yaitu 27 relasi keluar, yang menunjukkan tingkat keaktifan relatif lebih tinggi

dalam mengirim interaksi dibandingkan aktor lainnya. Adapun visualisasi posisi relatif aktor berdasarkan ukuran node ditampilkan pada Gambar 3 di bawah ini.



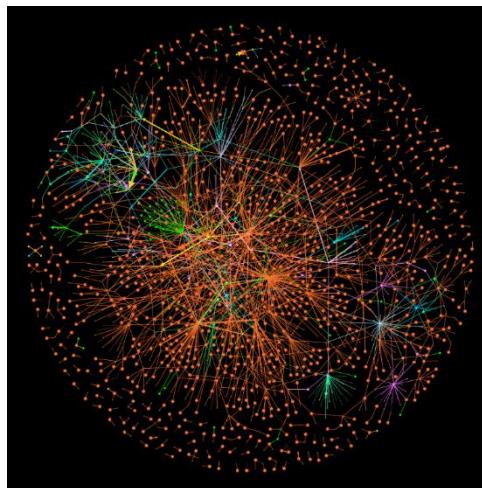
Gambar 3. Degree Centrality Jaringan #TolakRevisiUUTNI

Hasil analisis *closeness centrality* menunjukkan bahwa dari 2.016 aktor terdapat 958 aktor memiliki nilai maksimum 1 pada skala ternormalisasi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa aktor-aktor tersebut memiliki jarak struktural rata-rata yang paling dekat terhadap aktor lain di dalam jaringan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan menjangkau bagian lain dari jaringan tersebar luas dan tidak terkonsentrasi pada satu atau beberapa aktor tertentu. Contoh sepuluh aktor dengan nilai *closeness centrality* maksimum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis *Closeness Centrality*

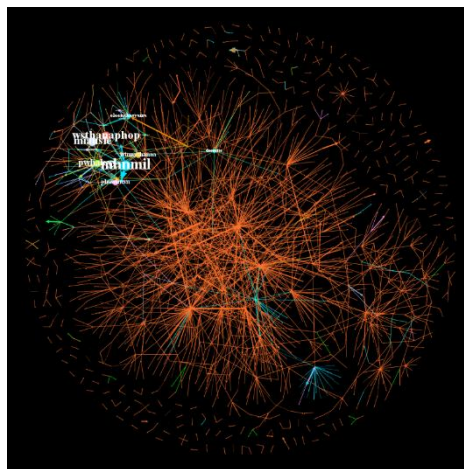
Akun	Hasil Olah Data
jaejeraa	1.0
Neptunushit	1.0
ssungshinee	1.0
gue_rela	1.0
dsyrach_	1.0
wansjps_358	1.0
martosaeban	1.0
cnddp_	1.0
sukarja	1.0
raenagra	1.0

Sementara distribusi posisi aktor dalam jaringan divisualisasikan pada gambar berikut.



Gambar 4. *Closeness Centrality* Jaringan #TolakRevisiUUTNI

Gambar 3 di atas menampilkan visualisasi sentralitas kedekatan jaringan #TolakRevisiUUTNI, di mana titik warna oranye merepresentasikan aktor dengan nilai sentralitas kedekatan sebesar 1. Dominasi warna tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar aktor berada pada posisi kedekatan yang relatif sama dalam struktur jaringan.



Gambar 5. *Betweenness Centrality* Jaringan #TolakRevisiUUTNI

Pada analisis *betweenness centrality*, sebagian besar aktor memiliki nilai yang sangat rendah dan mendekati nol, menunjukkan lemahnya peran perantara dalam jaringan secara keseluruhan. Meskipun demikian, akun @mhnmil tercatat memiliki nilai *betweenness centrality* tertinggi sebesar 0,000626, diikuti oleh @wsthanaphop dan @miausle. Aktor-aktor ini relatif lebih sering berada pada jalur penghubung antarkelompok dibandingkan aktor lainnya, meskipun tingkat perantaraannya tetap terbatas secara struktural. Rincian sepuluh aktor dengan nilai *betweenness centrality* tertinggi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Analisis *Betweenness Centrality*

Akun	Hasil Olah Data
mhnmil	0.000626
wsthanaphop	0.000506

miausle	0.000500
pwhaley	0.000442
winythanaa	0.000350
phuwintsn	0.000333
eleenakasyaira	0.000268
deeewtee	0.000252
wonjuyi	0.000195
DenaAulia849396	0.000171

Pembahasan Hasil SMNA dalam Kerangka Teori *Digital Movement of Opinion* (DMO)

Hasil analisis jaringan media sosial terhadap percakapan publik pada tagar #TolakRevisiUUTNI menunjukkan bahwa struktur jaringan yang terbentuk memiliki karakteristik yang selaras dengan konsep *Digital Movement of Opinion* (DMO) yang bersifat spontan, tidak berlangsung lama, opini homogen, dan bersifat lintas sektor (Barisione & Ceron dalam Eriyanto, 2021). Berikut pembahasan lebih rincinya.

Level Sistem

Pada level sistem, metrik jaringan menunjukkan densitas yang sangat rendah, sentralisasi yang mendekati nol, serta resiprositas yang rendah. Kombinasi metrik tersebut menggambarkan jaringan percakapan yang bersifat tersebar, tidak terpusat, dan didominasi oleh pola komunikasi satu arah, sebagaimana menjadi ciri umum gerakan opini publik digital yang muncul secara spontan (Eriyanto, 2021).

Nilai densitas sebesar 0,001 menunjukkan bahwa tingkat kerapatan hubungan antaraktor dalam jaringan tergolong sangat rendah. Densitas mengacu pada perbandingan antara jumlah relasi yang terbentuk dengan jumlah relasi yang secara teoritis mungkin terjadi (Eriyanto, 2021). Nilai yang mendekati 0 menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil aktor yang saling terhubung secara langsung, sementara sebagian besar aktor berpartisipasi dalam percakapan tanpa keterikatan komunikasi yang intensif. Kondisi ini mencerminkan partisipasi publik yang tersebar luas dan tidak terorganisasi secara formal akibat gerakan digital yang bersifat spontan.

Nilai diameter sebesar 14 menunjukkan bahwa jarak terjauh antara dua aktor dalam jaringan percakapan #TolakRevisiUUTNI mencapai 14 langkah. Mengacu pada Wasserman dan Faust (dalam Eriyanto, 2021) diameter tidak memiliki tolok ukur normatif untuk dikategorikan sebagai pendek atau panjang, melainkan bersifat kontekstual dan bergantung pada ukuran serta kompleksitas jaringan. Diameter digunakan untuk menggambarkan seberapa mudah seorang aktor dalam jaringan dapat menjangkau atau dijangkau oleh aktor lain, sehingga nilai yang didapatkan mengindikasikan bahwa aktor tertentu memerlukan hingga 14 langkah untuk terhubung dengan aktor lain di dalam jaringan.

Sementara itu, nilai sentralisasi sebesar 0,0000157 menunjukkan bahwa struktur jaringan bersifat sangat terdesentralisasi. Sentralisasi mengukur sejauh mana arus komunikasi terkonsentrasi pada satu atau beberapa aktor dominan (Eriyanto, 2021). Nilai yang mendekati nol menandakan bahwa tidak terdapat aktor yang secara struktural

mendominasi arus komunikasi dalam jaringan. Temuan ini menegaskan bahwa percakapan #TolakRevisiUUTNI berkembang tanpa figur pemimpin formal yang mengendalikan arah komunikasi, sejalan dengan karakter utama *Digital Movement of Opinion* yang spontan.

Nilai resiprositas sebesar 0,0534146 menunjukkan bahwa hubungan komunikasi dalam jaringan cenderung bersifat satu arah. Resiprositas mengukur sejauh mana relasi dalam jaringan berlangsung secara timbal balik (Eriyanto, 2021). Nilai yang rendah mengindikasikan bahwa aktivitas komunikasi seperti *mention*, *reply*, dan *retweet* tidak selalu diikuti oleh respons balik dari aktor yang dituju. Pola ini menunjukkan bahwa jaringan percakapan lebih berfungsi sebagai ruang penyampaian opini dibandingkan sebagai ruang dialog yang bersifat interaktif.

Selain metrik jaringan, penelitian ini juga menyertakan data pendukung berupa arsip *trending* dan analisis *wordcloud* untuk memberikan konteks dinamika percakapan publik. Data ini tidak digunakan sebagai variabel analisis jaringan, melainkan sebagai pelengkap interpretasi guna memahami intensitas, durasi, dan kecenderungan narasi dalam gerakan opini publik digital #TolakRevisiUUTNI.

Tabel 5. Data Arsip Trending #TolakRevisiUUTNI di X

Tanggal	Jumlah <i>Tweet</i>	Peringkat “Most <i>Tweeted</i> ”	Lama <i>Trending</i>	Peringkat “Longest <i>Trending</i> ”
20 Maret 2025	845,000	#1	11,5 jam	#4
21 Maret 2025	1,240,000	#1	23 jam	#1
22 Maret 2025	966,000	#1	23,5 jam	#1
23 Maret 2025	731,000	#1	Tidak masuk top 5	–
24 Maret 2025	–	Tidak masuk top 5	–	–

Sumber: <https://archive.twitter-trending.com/indonesia>, 2025.

Tabel di atas menunjukkan bahwa tagar #TolakRevisiUUTNI mengalami lonjakan intensitas percakapan secara cepat dan menempati peringkat teratas trending pada 20–22 Maret 2025, sebelum kemudian mengalami penurunan signifikan pada hari-hari berikutnya. Pola ini menunjukkan bahwa perhatian publik bersifat reaktif terhadap momentum isu dan tidak terjaga dalam jangka panjang. Dalam kerangka *Digital Movement of Opinion*, kondisi tersebut mencerminkan karakter gerakan opini digital yang spontan dan berumur pendek karena tidak ditopang oleh struktur organisasi yang menjaga kesinambungan partisipasi.



Gambar 6. Word cloud Tagar #TolakRevisiUUTNI di X

Selanjutnya, berdasarkan gambar *wordcloud* di atas menunjukkan bahwa percakapan yang terbentuk bersifat seragam dan berpusat pada satu arah narasi, yaitu penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI. Kata-kata yang paling menonjol seperti “tolakrevisiutni”, “tolakdwifungsiabri”, “tolakruupolri”, “cabutruutni”, “supremasisipil”, dan “indonesiagelap” memperlihatkan fokus opini yang homogen pada isu militerisasi serta pentingnya menjaga supremasi sipil dalam sistem demokrasi. Sementara itu, kemunculan istilah lain seperti “rakyat”, “pejabat”, “dpr”, “rezim”, “demokrasi”, dan “makzulkanprabowogibran” menunjukkan bahwa opini publik yang berkembang tidak hanya bersifat reaktif terhadap satu kebijakan, tetapi juga memuat ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi politik secara lebih luas.

Level Kelompok

Pada level kelompok, nilai modularitas sebesar 0,822 menunjukkan bahwa jaringan percakapan #TolakRevisiUUTNI terfragmentasi ke dalam banyak klaster. Nilai modularitas yang mendekati satu mengindikasikan bahwa aktor cenderung membentuk kelompok-kelompok percakapan dengan intensitas hubungan internal yang lebih kuat dibandingkan hubungan antarkelompok (Eriyanto, 2021). Fragmentasi ini mencerminkan tidak adanya mekanisme pemersatu yang mengintegrasikan percakapan secara menyeluruh, yang merupakan karakteristik umum gerakan opini digital yang bersifat spontan dan tidak terkoordinasi secara formal.

Level Aktor

Pada level aktor, *degree centrality* menunjukkan bahwa aktor-aktor dengan tingkat keterhubungan tertinggi berasal dari beragam tipe akun, seperti akun menfess bot (@tanyarlfs), akun komunitas (@barengwarga), dan akun personal (@gorokareshi). Tidak ditemukannya dominasi aktor institusional atau elit politik menunjukkan bahwa mobilisasi opini publik dalam jaringan #TolakRevisiUUTNI bersifat lintas sektor. Meskipun terdapat aktor dengan nilai *degree centrality* yang relatif lebih tinggi dibandingkan aktor lain, besaran nilai *degree centrality* yang diperoleh secara umum tetap rendah. Misalnya, akun @tanyarlfs yang menjadi akun dengan nilai *degree centrality*, yaitu sebesar 0.032754342. Angka tersebut

apabila dilihat dengan pamater 0-1, sangat mendekati 0 dibandingkan 1. Hal ini menjadikan peran aktor-aktor tersebut tidak bersifat dominan secara struktural.



Gambar 7. Aktor Degree Centrality Tertinggi dalam Jaringan #TolakRevisiUUTNI

Selain itu, hasil *closeness centrality* juga menunjukkan banyaknya aktor dengan nilai 1 (maksimum) mengindikasikan bahwa posisi aktor dalam jaringan relatif setara dalam hal jarak struktural. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemampuan untuk menjangkau bagian lain dari jaringan tidak terkonsentrasi pada aktor tertentu. Sementara itu, rendahnya nilai *betweenness centrality* pada sebagian besar aktor menunjukkan bahwa peran penghubung antarkelompok tidak dijalankan oleh aktor tertentu secara signifikan, melainkan tersebar secara terbatas dalam struktur jaringan.

Pembahasan Hasil Analisis dalam Perspektif Teori Ruang Publik

Dalam perspektif Jürgen Habermas, ruang publik dipahami bukan sebagai tempat fisik, institusi formal, atau struktur administratif tertentu, melainkan sebagai kondisi dan proses komunikasi yang dihasilkan serta direproduksi melalui interaksi antarsesama warga negara. Ruang publik hadir ketika individu-individu privat berhimpun sebagai publik untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan penilaian terhadap persoalan bersama (Hardiman, 2014). Dengan demikian, ruang publik tidak bersifat alamiah atau statis, tetapi terbentuk melalui praktik komunikasi sosial yang berlangsung di antara warga itu sendiri.

Hardiman (2014) menjelaskan bahwa konsep ruang publik dapat dipahami melalui dua lapisan makna yang saling berkaitan. Dalam arti deskriptif, ruang publik dipahami sebagai ranah komunikasi yang dibedakan dari ruang privat, yaitu ruang yang dapat diakses oleh semua orang (*allgemeine zugänglichkeit*) dan berada di luar wilayah intimitas domestik. Pemaknaan ini tidak mengandaikan kualitas diskursus tertentu, melainkan menegaskan keberadaan komunikasi publik sebagai kategori dasar dalam masyarakat modern. Sementara itu, dalam arti normatif atau politis, ruang publik dipahami sebagai kondisi komunikasi yang memungkinkan arus opini dan aspirasi publik terbentuk melalui interaksi antarsesama warga negara. Dalam pengertian ini, ruang publik tidak dipahami sebagai institusi formal, melainkan sebagai kondisi komunikatif yang memungkinkan pembentukan opini publik secara kolektif (Hardiman, 2009).

Setiawan (2023) menegaskan bahwa ruang publik normatif yang dicita-citakan Habermas adalah ruang komunikasi yang relatif otonom dari kepentingan politik dan ekonomi, sehingga warga masyarakat dapat mengekspresikan pandangan, kritik, dan gagasan mereka secara bebas dan setara. Citra normatif tersebut secara historis digambarkan Habermas melalui ruang publik borjuis abad ke-18 di Inggris, Prancis, dan Jerman, ketika warga biasa berdiskursus secara kritis di salon dan kafe. Namun, Habermas juga menunjukkan bahwa dalam masyarakat modern ruang publik mengalami pergeseran struktural seiring berkembangnya kapitalisme dan media massa, yang menyebabkan komunikasi publik semakin rentan terhadap dominasi kepentingan negara dan pasar. Oleh karena itu, ruang publik menurut Habermas selalu berada dalam ketegangan antara normatif komunikasi rasional dan realitas komunikasi yang problematis serta mudah terdistorsi (Hardiman, 2014).

Adapun hasil analisis jaringan media sosial pada tagar #TolakRevisiUUTNI menunjukkan bahwa platform X berfungsi sebagai arena komunikasi publik yang melibatkan ribuan aktor dalam waktu singkat. Aktivitas *mention*, *reply*, dan *retweet* membentuk arus opini publik digital yang berkembang cepat, tetapi ditandai oleh rendahnya resiprositas dan fragmentasi jaringan ke dalam banyak kluster. Pola ini menunjukkan bahwa interaksi antarpengguna cenderung berlangsung satu arah dan tersebar tanpa membentuk struktur komunikasi yang kohesif.

Dalam kerangka teori ruang publik Habermas, temuan ini dapat terlebih dahulu dipahami dalam arti ruang publik secara deskriptif, yakni sebagai ranah komunikasi yang dibedakan dari ruang privat (Hardiman, 2014). Percakapan pada tagar #TolakRevisiUUTNI berlangsung di wilayah komunikasi yang terbuka dan dapat diakses publik luas, serta berada di luar ranah intimitas privat. Dalam pengertian ini, jaringan percakapan yang terbentuk merepresentasikan keberadaan komunikasi publik tanpa dengan sendirinya mengandaikan kualitas diskursus tertentu. Pemaknaan tersebut sejalan dengan pandangan Wahyudi dkk. (2024) yang menegaskan bahwa ruang media sosial merupakan ruang virtual yang bersifat aktual karena dimediasi oleh praktik komunikasi nyata. Merujuk pada Loader dan Mercea serta Dahlberg (dalam Wahyudi dkk., 2024) menjelaskan bahwa ruang publik digital tidak menggantikan ruang publik nyata, melainkan memperluas arena komunikasi publik. Media sosial, dengan demikian, memungkinkan partisipasi komunikasi yang luas, tetapi tidak otomatis memenuhi tuntutan normatif ruang publik politis.

Namun, ketika temuan penelitian ini direfleksikan dalam pengertian ruang publik politis sebagaimana dirumuskan Habermas (dalam Hardiman, 2014), tampak adanya keterbatasan struktural. Fragmentasi jaringan dan rendahnya resiprositas menunjukkan bahwa percakapan publik berkembang dalam komunitas-komunitas yang relatif terpisah dan tidak terpelihara secara diskursif. Pola ini berbeda dari gambaran ruang publik borjuis Habermas, yang ditandai oleh diskursus kritis yang relatif setara dan berkelanjutan. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Setiawan (2023) yang menyoroti karakter komunikasi media sosial yang cepat, reaktif, dan cenderung dangkal. Arus informasi yang berkecepatan tinggi mendorong partisipasi luas, tetapi sekaligus membatasi reflektivitas

dan kontinuitas diskursus. Relasi komunikasi di media sosial bersifat temporer dan rapuh, sehingga sulit membangun ruang diskursus bersama yang stabil.

Refleksi ini juga sejalan dengan pemikiran Supelli (dalam Hardiman, 2014) yang menegaskan bahwa pelipatgandaan ruang komunikasi digital tidak identik dengan peningkatan kualitas diskursus publik. Media sosial memperluas jangkauan komunikasi, tetapi tetap rentan terhadap distorsi, fragmentasi, dan banjir informasi. Dalam kerangka pemikiran Hardiman, temuan ini dapat dipahami melalui fungsi ruang publik sebagai tempat “pengeraman kegelisahan politis warga” (Hardiman, 2014). Aktivitas percakapan pada tagar #TolakRevisiUUTNI menunjukkan bahwa media sosial X berperan sebagai ruang sirkulasi kegelisahan, kritik, dan penolakan terhadap kebijakan negara yang bersifat luas namun temporer.

Dengan demikian, jaringan percakapan #TolakRevisiUUTNI dapat diposisikan sebagai praktik ruang publik dalam arti deskriptif, sekaligus memperlihatkan keterbatasannya sebagai ruang publik politis dalam arti normatif. Media sosial X berfungsi sebagai arena komunikasi publik untuk menyirkulasikan opini dan kegelisahan politis warga, tetapi ruang tersebut tetap bersifat problematis, terfragmentasi, dan tidak terpelihara secara diskursif, sebagaimana telah diperhitungkan dalam kerangka teori ruang publik Habermas.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan percakapan pada tagar #TolakRevisiUUTNI di platform X merepresentasikan respons publik digital terhadap kebijakan revisi Undang-Undang TNI dengan struktur yang renggang, terdesentralisasi, dan didominasi oleh pola komunikasi satu arah. Nilai densitas, sentralisasi, dan resiprositas yang rendah mengindikasikan bahwa interaksi antarpengguna berlangsung terbatas dan tidak dikendalikan oleh aktor tertentu, sementara diameter jaringan menunjukkan penyebaran respons publik yang relatif luas. Pada level kelompok, nilai modularitas yang tinggi memperlihatkan fragmentasi percakapan ke dalam berbagai kluster diskusi, dan pada level aktor tidak ditemukan dominasi komunikasi oleh satu akun tertentu. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa gerakan opini publik digital #TolakRevisiUUTNI berkembang secara horizontal, spontan, dan tanpa kepemimpinan terpusat dalam ruang publik digital.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa dinamika opini publik di media sosial tidak selalu terbentuk melalui mobilisasi aktor dominan, melainkan dapat muncul secara organik melalui partisipasi masyarakat yang tersebar luas. Bagi pembuat kebijakan dan pengelola komunikasi publik, hasil ini menegaskan pentingnya meningkatkan keterbukaan informasi serta membangun komunikasi publik yang lebih partisipatif, karena respons publik digital dapat berkembang cepat meskipun tanpa struktur koordinasi formal. Bagi masyarakat, temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam ruang digital memiliki potensi membentuk tekanan opini publik, meskipun masih cenderung terfragmentasi dan kurang kohesif.

Selain itu, bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan analisis jaringan media sosial dengan pendekatan lain, seperti analisis isi, analisis wacana, atau analisis sentimen, guna memperkaya pemahaman tentang makna dan arah opini publik digital. Selain itu, perluasan cakupan platform, periode waktu, maupun isu kebijakan juga penting dilakukan untuk melihat variasi pola jaringan dan dinamika gerakan opini publik di ruang digital.

Daftar Pustaka

- Akbar, M. A., Masniarara Aziza Balfas Amril, Raiza Syahira, Fahrein Rachel Latisha, & Noor Jihan. (2022). Analisis Struktur Jaringan Komunikasi #Seagames2022 Di Twitter Menggunakan Pendekatan Social Network Analysis (Sna). *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 26(1), 1–16. <https://doi.org/10.17933/jskm.2022.4780>
- Alfarizy, S. N., & Arianto, I. D. (2024). Analisis Jaringan Komunikasi Isu Adakami pada Platform Media Sosial Twitter (X). *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, (7), 6437–6446. <http://Jiip.stkipyapisdampu.ac.id>
- Alhady, M. I. (2023). *Analisa Implementasi Pengolahan Data Management Di Pt Dayamitra Telekomunikasi Tbk.*
- Alim, S., & Dharma, A. F. (2021). Youtube Sebagai Ruang Publik Alternatif Bagi Anak Muda. *Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.33021/exp.v4i1.1437>
- Anbarini, R., Wibowo, S. K. A., Sjarifah, N. A., & Abdullah, A. (2023). Mobilizing the Digital Opinion Movement #OraSudiSumbangIKN on Twitter. *Jurnal Komunikasi*, 15(1), 18–36. <https://doi.org/10.24912/jk.v15i1.19187>
- Ariyanti, Y. D. P. (2022). Analisis Centrality Aktor pada Penyebaran Informasi Kuliner di Media Sosial dengan menggunakan Social Network Analysis. *J. Syst. Inf. Technol. Electron. Eng*, 2(1), 21–1. <http://e-journal.ivet.ac.id/index.php/jsitee>
- Athallah, R. E., Khairunnisa, A., & Safitri, D. (2025). Tagar sebagai Praktik Perlawanan Digital Warga Strategi Diskursif dalam# TolakRUUTNI di Media Sosial. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2025*, 15(1), 31–56.
- Atma, W., & Wibowo, A. (2026). Analisis Pemenuhan Asas Keterbukaan Dalam Perubahan UU TNI 2025. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 4(1), 43–53. <https://doi.org/10.51903/6rjyva79>
- Chaterine, R. H., & Ramadhan, A. (2025, Maret 20). *RUU TNI Sah Jadi Undang-Undang, Ini Poin-poin Perubahannya.* <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/20/10494931/ruu-tni-sah-jadi-undang-undang-ini-poin-poin-perubahannya>
- Dwityas, N. A., Marta, R. F., & Briandana, R. (2023). Media Sosial dan Aktivisme Digital Perempuan: Analisis Wacana #Ibutunggalmelawan di Instagram. *Jurnal Komunikasi*, 18(2), 109–132. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol18.iss2.art1>
- Eriyanto, E. (2019). Hashtags and Digital Movement of Opinion Mobilization: A Social Network Analysis/SNA Study on #BubarkanKPAI vs #KamiBersamaKPAI Hashtags. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 8(3), 167–178. <https://doi.org/10.7454/jki.v8i3.11591>

- Eriyanto. (2021). *Analisis Jaringan Media Sosial Dasar-dasar dan Aplikasi Metode Jaringan Sosial untuk Membedah Percakapan di Media Sosial* (1 ed.). Kencana.
- Ghufron, M. I., Supriyati, E., & Listyorini, T. (2024). Analisa Jejaring Sosial Terhadap Fenomena Cyberbullying Fandom K-Pop pada Sosial Media Twitter. *Jurnal Informatika Sunan Kalijaga*, 9(2), 79–93.
- Hardiman, B. (2009). *Demokrasi Deliberatif Menimbang “Negara Hukum” dan “Ruang Publik” dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. PT KANISIUS.
- Hardiman, B. (2014). *Ruang Publik Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace*. PENERBIT KANISIUS.
- Hidayat, R., Imran, & Ramadhan, R. (2025). Peran Media Sosial Dalam Mengkonstruksi Opini Publik Terkait Kebijakan Pemerintah: Studi Kasus Wacana Publik Tahun 2025. 3(2), 64–75. <https://doi.org/10.47650/core.v3i2.2223>
- Jabir, S. R., Azis, H., Widyawati, D., & Tenripada, A. U. (2023). Prediksi potensi donatur menggunakan model Logistic Regression. *Indonesian Journal of Data and Science (IJODAS)*, 4(1), 31–37.
- Kemp, S. (2025, Februari 25). *DIGITAL 2025: INDONESIA*. datareportal.com. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia?rq=indonesia%202025>
- Kusnanto, & Yusuf, H. (2024). Pengaruh Media Massa Terhadap Persepsi Dan Tingkat Kriminalitas : Analisis Terhadap Efek Media Dalam Pembentukan Opini Publik. *Jicn: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1047–1061. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Mutaqqin, M. F. J. (2022). Cluster Analysis Using K-Means Method to Classify Sumatera Regency and City Based on Human Development Index Indicator (An Effort to Accelerate Regional Development After COVID-19 Pandemic). *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 967–976.
- Nur, D., Ibraya, N. S., & Marsuki, N. R. (2024). Dampak Sosiologi Digital Terhadap Perubahan Sosial Budaya Pada Masyarakat Masa Depan. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 2(2), 123–135. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1518>
- Pahtoni, T. Y., & Jati, H. (2024). Analisis Sentimen Data Twitter Terkait Chatgpt Menggunakan Orange Data Mining. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 11(2), 329–336. <https://doi.org/10.25126/jtiik.20241127276>
- Putra, R. P. I., Akbar, M., & Amalia, R. 2020. Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kinerja Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Menggunakan Metode Backpropagation. *Journal of Information Technology Ampera*, 1(2), 2774–2121.
- Putri Ajie, Z., & Wardhana, A. (2025). Analisis Sentimen Negatif Publik pada Tagar #KaburAjaDulu di Media Sosial “X.” *Jurnal Audiens*, 6(3), 430–442. <https://doi.org/10.18196/jas.v6i3.608>
- Radjah, E. G., Iriani, A., & Manongga, D. H. F. (2023). Analisis Terhadap Tagar #LGBT di Twitter Menggunakan Analisis Jaringan Sosial (SNA). *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, 7(1), 300–311. <https://doi.org/10.30865/mib.v7i1.5476>
- Rakinda, O. R., Sutrisno, N. W. A., Salam, R., & Andriansyah, A. (2026). Tindakan Komunikatif di Ruang Publik: Menilai Demokrasi Deliberatif Habermasian dalam Tata

- Kelola Digital. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 4(4), 1372–1381. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.320>
- Rismawan, S. A., & Syahidin, Y. (2023). Implementasi Website Berita Online Menggunakan Metode Crawling Data Dengan Bahasa Pemrograman Python. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 10(3), 167–178. <http://jurnal.mdp.ac.id>
- Santoso, L., & Priyadi. (2024). Mengoptimalkan Proses Pembersihan Data dalam Analisis Big Data Menggunakan Pipeline Berbasis AI. *JURNAL ELEKTRONIKA DAN KOMPUTER*, 17(2), 657–666. <https://doi.org/10.51903/elkom.v17i2.2311>
- Satria, H. (2024). *Cara Mendapatkan Data (Crawl) Twitter X - Maret 2024*. helmisatria.com. <https://helmisatria.com/blog/updated-crawl-data-twitter-x-maret-2024>.
- Setiamukti, M. F., & Nasvian, M. (2023). Social Network Analysis #Usuttuntas Pada Media Sosial Twitter (Data Twitter 11 November 2022). *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 124–137. <https://doi.org/10.33822/jep.v6i1.5427>
- Setiawan, F. R. (2023). Peran Media Sosial Sebagai Ruang Publik: Tinjauan Filosofis Gagasan Ruang Publik Jürgen Habermas. *Melintas*, 39(3), 323–350.
- Sjarif, F. Ahlan. (2022, Juli 13). *Arti Meaningful Participation dalam Penyusunan Peraturan*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-imeaningful-participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0/>
- Srinanda, D., Sisilia, K., & Peranginangin, Y. (2020). Analisis Promosi Penjualan Gopay Dengan Metode Social Network Analysis Di Media Sosial Twitter. *Journal of Applied Business Administration*, 4, 163–170. <https://www.bi.go.id/>
- Sudaryana, B., & Agusiady, H. R. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Deepublish.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2 ed.). ALFABETA, cv.
- Suhendra, S., & Selly Pratiwi, F. (2024). Peran Komunikasi Digital dalam Pembentukan Opini Publik: Studi Kasus Media Sosial. *Iapa Proceedings Conference*, 293–315. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1059>
- Tripalupi, M. F., Aini, H. N., & Ayodya, B. P. (2024). Kajian Resistensi Sosial Pengguna Media Sosial X Dalam Tagar #Netizenselalubbenar Melalui Analisis Jaringan Komunikasi. *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 13(2), 139–152. <https://doi.org/10.33508/jk.v13i2.5811>
- Utami, P. (2025). Analisis Respons Publik di Media Sosial terhadap Proses Legislasi RUU TNI dalam Kerangka Demokrasi Deliberatif. *Jurnal Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(1), 138–156. <https://doi.org/10.21009/C>
- Utami, S. R., Safitri, R. N., & Kuncoroyakti, Y. A. (2021). Analisis Jaringan dan Aktor #BatalanOmnibusLaw di Media Sosial Twitter Menggunakan Social Network Analysis (SNA). *Journal Of Media and Communication Science*, 4(3), 135–148.
- Wahyudi, R. F., Musliadi, Muhlis, & Faridah. (2024). Demokrasi di Ruang Publik dan Media Sosial dalam Perspektif Kajian Kritis. *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 6(2), 1–27. <https://doi.org/10.47435/retorika.v3i1.577>
- Wahyuningtyas, Prihatini. (2025, Maret 17). *Isi RUU TNI 2025 dan Daftar Pasal yang Kontroversial*. tirto.id. <https://tirto.id/isi-ruu-tni-2025-dan-daftar-pasal-yang-bermasalah-g9v4>

Wuriani, N. I. (2021). Aktivisme Tagar #Percumalaporpolisi Sebagai Zeitgeist Demokrasi Siber Di Indonesia. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 20(2), 171–183. <https://doi.org/10.32509/wacana.v20i2.1702>